

Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone

A. Rahmawati^{1*}, Muh Isa Ansari², Anwar Parawangi³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to analyze and describe the implementation of commodity development program policies in the strategy area at Bone Regency. The research method used descriptive qualitative. The number of informants in the study were 15 people. Data collection used observation, interview, and documentation techniques. Data analysis were data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study showed that the implementation of the Commodity Development Program Policy in the Strategic Area in Bone Regency was good, this was seen from the collaboration of the implementor in carrying out its duties but there were difficulties that got by the government especially in providing data and information about the superior commodities owned by the CWC. Commodity development programs in the CWC in Bone Regency especially in Palakka Sub-District, Awangpone and Barebbo greatly helped to increase the income of the local community with this program the community could find out how to develop superior commodities in the CWC region it had been realization in the CWC area.

Keywords: *policy implementation, commodity development program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 15 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone sudah bagus, hal ini diliat dari kerjasama implementor dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi ada kesulitan yang dialami pemerintah khususnya dalam menyediakan data dan informasi mengenai komoditas unggulan yang dimiliki KSK. Program pengembangan komoditas pada KSK di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Palakka, Awangpone dan Barebbo sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan adanya program ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara mengembangkan komoditas unggulan di wilayah KSK tersebut itu sudah terealisasikan dengan baik di wilayah KSK.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, program pengembangan komoditas

* andirahmawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Salah satu komponen proses kebijakan sebagai solusi, maka kebijakan publik menjadi penting untuk diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berbentuk implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menjalankan proses implementasi kebijakan baik berupa program maupun kegiatan seringkali mengalami distorsi, sehingga kebijakan tersebut memberikan dampak kegagalan suatu kebijakan publik dalam pengimplementasian program dan kebijakan. Atas dasar itu maka diperlukan sebuah model implementasi kebijakan publik yang harus lahir dari serangkaian input, proses dan output yang terencana dan berkesinambungan.

Perkembangan proses implementasi kebijakan publik telah terimplementasikan sebagai sebuah kajian administratif secara kompleks. Tentu kompleksitas implementasi kebijakan publik ini selalu berkembang sesuai dengan permasalahan publik yang dihadapi oleh pemerintah dalam

mengimplementasikan kebijakannya. Banyak masalah implementasi kebijakan yang belum efektif dikarenakan para implementer kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara efektif.

Salah satu permasalahan kebijakan yang perlu mendapatkan implementasi dari para implementor pemerintah di dalam menangani dan memberikan solusi dalam kaitannya dengan permasalahan publik adalah pengembangan program komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone. Proses implementasi dari program ini sering mengalami permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya khususnya yang berkaitan dengan implementasi perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and Inter-Organizational behavior*), perilaku level bawah (*Street Level Buraucratic behavior*) dan perilaku target sasaran (*Target Group bevavior*).

Kawasan strategi kabupaten adalah kawasan diwilayah kabupaten yang dinilai memiliki potensi dan prospek untuk dapat mengaktifkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal di kabupaten, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memacu pengembangan wilayah

guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Adapun kawasan strategi kabupaten dimaksud yaitu Kecamatan Barebbo, Awangpone, Palakka. Ketiga kecamatan ini memiliki karakter atau potensi wilayah berbeda satu sama lain dalam rangka pengembangan komoditas di wilayah tersebut. Atau dengan kata lain masing-masing wilayah kawasan strategi kabupaten memiliki potensi komoditas yang berbeda-beda pula.

Penetapan kawasan strategi kabupaten ini Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan harapan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya melalui

pemberdayaan sektor/sub sektor unggulan sebagai penggerak ekonomi daerah dan wilayah. Kawasan dalam suatu wilayah administratif kabupaten dikatakan strategis berdasarkan konsep PNPM PISEW, (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri – Pengembangan Imprastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yakni; kawasan itu memiliki komoditas atau sektor unggulan yang dapat dikelola dalam suatu kegiatan bisnis. Dapat menghidupkan kegiatan ekonomi lokal di kawasan dan wilayah tersebut. Artinya, jika kawasan dan aktivitas bisnis di kawasan itu dikelola dengan baik, maka dapat memberikan iuran yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan

dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implemmentor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak

yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi yaitu misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik. Nugroho (2016) menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai wujud dalam menghadirkan atau mengeksekusi sebuah kebijakan. Misi yang menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi. Dari visi inilah lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik. Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kegiatan. Hal untuk menegaskan sesuai dengan desain struktur proses implementasi.

Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat

dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancangkan sebelumnya.

Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya (dalam Mustari, 2013: 131).

Variabel-varabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut: a) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organizational and inter-organizational behavior*).

Dimensi-dimensinya adalah *komitmen* dan *koordinasi* antar organisasi dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga *stabilitas* organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

Koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pegaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi.

Sebab, bagaimanapun, implementasi kebijakan sangatnya rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit. Itulah sebabnya, kadangkala akibat ‘kerumitan’ tadi membuat permasalahan kebijakan terbelengkalai, b) Perilaku Birokrasi Level Bawah (*Street Level bureaucratic behavior*) Dimensinya adalah *diskresi*. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

Sehingga menurut Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya ‘menyimpang’ dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementai kebijakan public, dan kinerjanya sangat konsisten dengan

standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Parawangi,2011).

Kontribusi pemikiran Lipsky sangat penting untuk memahami model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih khusus terhadap mekanisme dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan konsekuensinya. Birokrasi level bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat. Michael Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi level bawah ini sebagai “*jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat*”. Dan secara substansial, mereka memiliki pertimbangan sekaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, berdasarkan posisinya ditengah masyarakat itu, mereka memilki peluang lebih besar dalamputusan kebijakan. Mereka dapat memberi pertimbangan, menggunakan pengaruhnya diluar kewenangan formal, sebagaimana Lipsky menyebut bahwa dalam implementasi kebijakan pengaruh lebih dominan berasal dari pekerja lefel bawah ini, c) Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya memberi

pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup *respon positif* dan *negatif* masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

Variabel *perilaku target grup* dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan *positif* dan *negatif* (Winter:2003). Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

Pengembangan komoditas ini penting untuk dilakukan dengan selalu mengutamakan potensi yang dimiliki, dan yang menjadi langkah awalnya yaitu dengan melalui pewilayahan komoditas. Pewilayahan komoditas harus sesuai berdasarkan dengan daya dukung lahan yang diartikan agar produktivitas yang diusahakan dapat berjalan dengan optimal. rencana

pembangunan yang didasari oleh pewilayahan akan dapat mengurangi terjadinya persaingan baik jenis maupun produksi komoditas antar wilayah sehingga peluang pasar akan semakin terjamin. Untuk mendukung pengembangan potensi tersebut dibutuhkan suatu analisis yang menyeluruh yang meliputi berbagai aspek penting, seperti (1) menentukan komoditas unggulan yang tepat, sesuai dengan data-data hasil produksi yang ada; (2) mengetahui komoditas apakah yang sesungguhnya paling disukai oleh stakeholder selaku pelaku, sehingga dapat ditentukan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan program pengembangan komoditas; dan (3) analisis tentang kesesuaian lahan terhadap komoditas yang ada, upaya ini penting untuk dapat memetakan dengan jelas daya dukung dan lingkungan yang ada.

Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang mempunyai tingkat peluang pemasaran tinggi dan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Keunggulan suatu komoditas juga masih dapat dibagi menjadi dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki dengan dasar potensi yang ada sehingga

dapat membedakannya dengan daerah yang lain. Keunggulan komparatif dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk dapat bersaing dengan daerah lain.

Berdasarkan pendapat diatas tentang wilayah komoditas maka dipandang perlu untuk pengembangan wilayah komoditas dikabupaten dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2019. Lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti yaitu pada Kawasan Strategi Kabupaten Tepatnya di Kecamatan Barebbo, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan program perkembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten bone. Khususnya di Kec. Palakka, Kec. Awangpone dan Kec. Barebbo. maka penelitian ini harus dapat menilai secara langsung bagaimana perkembangan

komoditas unggulan di wilayah KSK. Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Tipe penelitian adalah deskriptif. peneliti bermaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone. Khususnya di Kec.Palakka, Kec. Awangpone, dan Kec.Barebbo.

Sumber data yang dinalisis dalam dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Informan penelitian meliputi : (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultur dan Perkebunan. (2) Dinas Kelautan dan perikanan. (3) Camat Kec. Palakka, Kec. Awangpone dan Kec. Barebbo. (4) penyuluh (5) Kelompok tani/masyarakat petani.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi lapangan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data yang penulis gunakan yaitu : Triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak dikota Watampone. Dengan berpegang motto *sumange' teallara'* (teguh dalam keyakinan kukuh dalam kebersamaan), Kabupaten Bone akan menjadi pemerintah dan masyarakat yang mampu menghadapi segala tantangan sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Kabupaten Bone juga sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi selatan yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur.

Kabupaten Bone memiliki warisan budaya dan kaya dengan pesan moral. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu dalam menghadapi kehidupan, dan menjawab berbagai tantangan pembangunan. Secara Administratif kabupaten ini terletak 174 km kearah timur Kota Makassar, berada pada posisi $4^{\circ}13'-5^{\circ}06'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42'-12^{\circ}40'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa, c) Sebelah

Timur berbatasan dengan Teluk Bone, d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Pembagian Administratif Berdasarkan data Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone sekitar 738.515 jiwa, terdiri dari 27 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan.

Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 754.894 jiwa yang terdiri atas 360.971 jiwa penduduk laki-laki dan 393.923 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,52 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,63.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2018 mencapai 166 jiwa/km² kepadatan penduduk di 27 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2,235 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan bontocani sebesar 34 jiwa/km²

Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) adalah kawasan di wilayah kabupaten yang dinilai memiliki potensi dan prospek untuk dapat mengaktifkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal di kabupaten, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memacu pengembangan wilayah guna mengurangi kesenjangan antar wilayah

Kawasan Strategi Kabupaten yang dimaksud adalah ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Palakka, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Barebbo.

Kecamatan Palakka merupakan Ibukota dari Kabupaten Bone dan salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone. Kata Palakka sendiri mempunyai arti menang dan arti sejarahnya yaitu tangga untuk menuju kemenangan dan tangga untuk menduduki singasana kerajaan (pada zaman kerajaan) sehingga menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Palakka, yang Ibukota Kecamatannya terletak di Ureng.

Kecamatan Awangpone merupakan Ibukota dari Kabupaten Bone dan salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone. Kata Awangpone mulanya terdiri dari beberapa wanua yang pada awal

terbentuknya kerajaan Bone (1330) bernama Tanete Riawang yang artinya suatu “Lompo” atau padang yang luas terletak disebelah Utara Bone sehingga menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Awangpone yang Ibukota Kecamatan Terletak di Lappoase dengan arti Lumbung padi.

Kecamatan Barebbo merupakan Ibukota dari Kabupaten Bone dan salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupten Bone. Dikatakan Barebbo karena terkenal dengan panen padinya pada musim rendengan (Bare) karena apabila panenanya berhasil dapat mencukupi kebutuhan seluruh Kabupaten Bone khususnya padi, yang akhirnya menjadi sebuahKecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Barebbo, yang Ibukota Kecamatan terletak di desa Apala.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Jadi, implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Soren C. Winter terdapat tiga variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

Perilaku organisasi dan antarorganisasi (organizational and inter-organizational behavior).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone adalah perilaku organisasi dan antar organisasi meliputi dua komponen, yaitu *Komitmen* dan *Koordinasi*. *Komitmen* organisasi yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, dalam kaitannya dengan

pelaksanaan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone adapun kawasan strategi kabupaten yang dimaksud disini yaitu Kecamatan Palakka, Awanagpone, Barebbo. Tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat. Disinilah komoditas dibutuhkan untuk tidak mengedepankan kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Palakka, Awangpone dan Barebbo. Salah satu faktor urgen yang berpengaruh dalam jaringan antarorganisasi dan berpengaruh terhadap penentuan strategi ekonomi daerah adalah koordinasi (Tjokroamidjojo, 1994: Sutan, 2001: Alwi, 2007). Koordinasi dilakukan dengan organisasi lintas sektor selaku pelaksana program pengembangan komoditas pada KSK di Kab. Bone, terikat dalam jaringan pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi dilakukan, baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Menurut Malon dikutip oleh Masl(Tanpa tahun) koordinasi adalah *the act managing interdependencies between activities* (tindakan yang saling ketergantungan untuk mengelolah antarara kegiatan). Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompleks memerlukan adanya koordinasi agar kegiatan dapat ,menghasilkan output yang maksimal (Borgatti,1996:1). Kerumitan organisasi dapat menyebabkan koordinasi biasanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Implementasi kebijakan program pengembangan komoditas di wilayah KSK adalah sesuatu yang rumit dan karena memerlukan banyak macam pengaturan dasar.Aturan dasar ini dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi, sebab tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas atau lebih rumit pula. Itulah sebabnya sehingga diperlukan hubungan antarorganisasi (O'Tool, 2000). Atau kerjasama dan koordinasi dari berbagai organisasi atau bagian-bagian organisasi (Hjer dan Porter, 1981).

Perilaku Birokrasi Level Bawah

(Street Level Bureaucracy)

Salah satu faktor yang memahami implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada

kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone adalah perilaku birokrasi level bawah dimensinya yaitu *diskresi*.

Diskresi adalah kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).Sehingga menurut Lipsky; 1980, dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya 'menyimpang' dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan.Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan public, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.

Selanjutnya perilaku birokrasi level bawah yang dimaksudkan disini adalah kemampuan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD), Lembaga pemberdayaan masyarakat desa(LPMD) dan Badan permusyawaratan desa(BPD), dalam menjalankan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone. Kemampuan LKD,LPMD dan BPD sebagai

implementor program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kabupaten Bone sudah merupakan ketetapan dalam program ini.

Perilaku Kelompok Sasaran (*target grup behavior*)

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone adalah perilaku kelompok sasaran dimensinya yaitu *respon positif* dan *respon negatif*.

Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif dan respon negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan baik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

KESIMPULAN

Perilaku organisasi dan antarorganisasi telah mengimplementasikan program

pengembangan komoditas sesuai dengan komitmen dan koordinasi. Komitmen implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten di Kec. Palakka, Kec. Awangpone dan Kec. Barebbo sudah bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama implementor dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan koordinasi masih menemukan kerumitan karena memerlukan kebijakan khusus melalui dua atau lebih organisasi. Hal ini belum efektifnya sistem koordinasi dalam menyediakan data dan informasi mengenai komoditas unggulan yang dimiliki KSK di Kabupaten Bone

Perilaku birokrasi level bawah telah diimplementasikan diskresi perilaku birokrasi level bawah sesuai kemampuan lembaga kemasyarakatan desa (LKD), Lembaga pembedayaan masyarakatan desa (LPMD), dan Badan permusyawaratan desa (BPD), dalam menjalankan program pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten sudah berjalan dengan baik, ketiga lembaga-lembaga ini bekerjasama untuk mensosialisasikan/menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengembangan komoditas unggulan di wilayah KSK di Kabupaten Bone.

Perilaku kelompok sasaran diimplementasikan sesuai respon positif dan respon negatif respon kelompok tani/masyarakat petani terhadap program ini bagus dan masyarakat sangat mendukung program ini karena program ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara bertani, beternak, dan menangkap ikan yang bagus dan benar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat diwilayah KSK Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuddin, 2014. *Pengembangan Kawasan Strategi yang Produktif*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Indriyani, Marzuki, 2014. *Identifikasi Tantangan Administrasi Publik*. Penerbit Pustakajaya, Jakarta.
- Mustari, Nuryanti, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar Membumi Publishing.
- Nugroho, Riant, 2016. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- , 2016. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parawangi, Anwar, 2011 ; *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pratomosunu, S, 2015. *Kebijakan Program Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen P, 2014. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa: JusufUdaya, Lic., Ec. Penerbit Arcan, Jakarta.
- Suratman, 2017. *Generasi Implementasi Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: capiya publishing
- Wahab, Solichin Abdul, 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Askara.
- Winter, Soren C, 2004. *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. *Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.